



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171

Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 374081

Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>, Pos-el : kanwiljogja@kemenkum.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP
KANTOR WILAYAH KMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah, sehingga program yang telah disusun tepat sasaran, akuntabel dan transparan. Dengan adanya SPIP akan semakin memudahkan tiap-tiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian internal, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban dan kinerja semakin akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan gambaran bahwa rencana aksi yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/target.

Tujuan : Guna memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaran pengendalian internal pada kantor wilayah telah berjalan maksimal dalam rangkaa mewujudkan 4 tujuan SPIP, yaitu Efektivitas dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dasar

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum;
- g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum;

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2025 dengan pengecekan langsung di lapangan apakah penyelenggaraan SPIP telah berjalan sesuai dengan rencana kerja.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada penyelenggaraan SPIP Triwulan III adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian			
a.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Penguatan terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika ASN	Telah sesuai rencana aksi	Perkuat Komitmen Integritas, Kakanwil Kemenkum DIY dan Jajaran Ikuti Webinar Nasional Anti Korupsi Humas Kemenkum Jogja / Berita Utama / 19 August 2025 / Hits: 99 

		Pemberantasan Praktek Pungutan Liar	Telah sesuai rencana aksi	Kemenkum DIY Terus Gaungkan Semangat Anti Korupsi, Tegaskan Komitmen Pelayanan Transparan dan Bebas Pungli Humas Kemenkum Jogja / Berita Utama / 22 July 2025 / Hits: 105 
		Pencegahan Gratifikasi	Telah sesuai rencana aksi	Kemenkum DIY Perkuat Penanganan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pungli Humas Kemenkum Jogja / Berita Utama / 09 September 2025 / Hits: 117 
		Terlaksananya Pengawasan Internal	Telah sesuai rencana aksi	
			Telah sesuai rencana aksi	 

		Pembinaan Berkelanjutan	Telah sesuai rencana aksi																																															
b.	Peningkatan Komitmen pada Kompetensi	Peningkatan Kompetensi	Telah sesuai rencana aksi																																															
		Usulan Diklat dalam pengembangan Kompetensi	Telah sesuai Rencana Aksi	LAMPIRAN: Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY Nomor : W.14.KP.06.03-6171 Tanggal : 13 Agustus 2022 DAFTAR NAMA PESERTA USULAN DIKLAT SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <table><tr><th>NO</th><th>NAMA/ NIP</th><th>JABATAN</th></tr><tr><td>1</td><td>YUSOF ARTO, S.H., M.H. 197506101997031001</td><td>KEPALA BIDANG TATA USAHA DAN UMUM</td></tr><tr><td>2</td><td>YUSTINA ELISTYA DEWI, S.Sos, M.Si. 197409202001122002</td><td>KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM</td></tr><tr><td>3</td><td>RETHO DEWI BAHOWATI, S.Si, M.H. 197808272001122001</td><td>KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAWAHLAN INTEKTUAL</td></tr><tr><td>4</td><td>HERNIYANTO, Bc.TP., S.H., M.H. 197010151993031001</td><td>PENYULUH HUKUM AHLI MADYA</td></tr><tr><td>5</td><td>WISNU NUGRAHYANTO, S.H, M.H. 198501212009121004</td><td>PERACAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA</td></tr><tr><td>6</td><td>SUSANTI YULINDARI, S.E, M.H. 197903132006042001</td><td>ANALIS HUKUM AHLI MADYA</td></tr><tr><td>7</td><td>P. SURYA KUMARA, S.H, M.H. 198712101987021001</td><td>PERENCANA AHLI MADYA</td></tr><tr><td>8</td><td>TALIFID EFFENDY WUATMORO, S.Si, M.H., M Kom. 198812302010131002</td><td>PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA</td></tr><tr><td>9</td><td>DWIHARISO NUGROHO, S.H. 197503062001121001</td><td>PRANATA HUMAS AHLI MUDA</td></tr><tr><td>10</td><td>MUKHAMAD ARIFF ROHMANN, S.H, M.H. 198502052005011001</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA</td></tr><tr><td>11</td><td>SRI PUJI KATUTI, S.Sos., M.Si. 197804202006042001</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA</td></tr><tr><td>12</td><td>ARIS SETYAWANTO, S.E. 198706152007031003</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA</td></tr><tr><td>13</td><td>YUNIAS BETA NUGRAHENI, S.E, M.M. 198606202010122001</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA</td></tr><tr><td>14</td><td>ANDRIYANTA S. S. T. 197808252006041001</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA</td></tr><tr><td>15</td><td>GALUH CITRA RAMADHANI, S.H. 199003312019012001</td><td>ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA</td></tr></table>  Kapala Kantor Wilayah, Agung Riktono Seto	NO	NAMA/ NIP	JABATAN	1	YUSOF ARTO, S.H., M.H. 197506101997031001	KEPALA BIDANG TATA USAHA DAN UMUM	2	YUSTINA ELISTYA DEWI, S.Sos, M.Si. 197409202001122002	KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3	RETHO DEWI BAHOWATI, S.Si, M.H. 197808272001122001	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAWAHLAN INTEKTUAL	4	HERNIYANTO, Bc.TP., S.H., M.H. 197010151993031001	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	5	WISNU NUGRAHYANTO, S.H, M.H. 198501212009121004	PERACAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	6	SUSANTI YULINDARI, S.E, M.H. 197903132006042001	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	7	P. SURYA KUMARA, S.H, M.H. 198712101987021001	PERENCANA AHLI MADYA	8	TALIFID EFFENDY WUATMORO, S.Si, M.H., M Kom. 198812302010131002	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	DWIHARISO NUGROHO, S.H. 197503062001121001	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	10	MUKHAMAD ARIFF ROHMANN, S.H, M.H. 198502052005011001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	11	SRI PUJI KATUTI, S.Sos., M.Si. 197804202006042001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	12	ARIS SETYAWANTO, S.E. 198706152007031003	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	13	YUNIAS BETA NUGRAHENI, S.E, M.M. 198606202010122001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	14	ANDRIYANTA S. S. T. 197808252006041001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	15
NO	NAMA/ NIP	JABATAN																																																
1	YUSOF ARTO, S.H., M.H. 197506101997031001	KEPALA BIDANG TATA USAHA DAN UMUM																																																
2	YUSTINA ELISTYA DEWI, S.Sos, M.Si. 197409202001122002	KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM																																																
3	RETHO DEWI BAHOWATI, S.Si, M.H. 197808272001122001	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAWAHLAN INTEKTUAL																																																
4	HERNIYANTO, Bc.TP., S.H., M.H. 197010151993031001	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA																																																
5	WISNU NUGRAHYANTO, S.H, M.H. 198501212009121004	PERACAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA																																																
6	SUSANTI YULINDARI, S.E, M.H. 197903132006042001	ANALIS HUKUM AHLI MADYA																																																
7	P. SURYA KUMARA, S.H, M.H. 198712101987021001	PERENCANA AHLI MADYA																																																
8	TALIFID EFFENDY WUATMORO, S.Si, M.H., M Kom. 198812302010131002	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA																																																
9	DWIHARISO NUGROHO, S.H. 197503062001121001	PRANATA HUMAS AHLI MUDA																																																
10	MUKHAMAD ARIFF ROHMANN, S.H, M.H. 198502052005011001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA																																																
11	SRI PUJI KATUTI, S.Sos., M.Si. 197804202006042001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA																																																
12	ARIS SETYAWANTO, S.E. 198706152007031003	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA																																																
13	YUNIAS BETA NUGRAHENI, S.E, M.M. 198606202010122001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA																																																
14	ANDRIYANTA S. S. T. 197808252006041001	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA																																																
15	GALUH CITRA RAMADHANI, S.H. 199003312019012001	ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA																																																

2.	Pelaksanaan		
a.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Rapat Pembahasan Identifikasi risiko, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Telah sesuai rencana aksi
b.	Penguatan dan peningkatan Pemahaman	Melaksanakan Internalisasi kepada seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum DIY	Telah sesuai rencana aksi

		Menyelenggarakan serta mengikuti sosialisasi/workshop dan/atau Bimtek	Telah sesuai rencana aksi
		Melaksanakan <i>in house Training</i>	Telah sesuai rencana aksi
c.	Pemberian Reward	Pemberian penghargaan kepada unit kerja dan/atau pegawai yang menerapkan MR dengan baik	Belum terlaksana
d.	Pengembangan Kebijakan	Menyusun panduan / SOP pengelolaan risiko	Telah sesuai rencana aksi
		Menyusun inovasi penanganan risiko	Telah sesuai rencana aksi
e.	Pengendalian Korupsi	Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Pencegahan Korupsi	Telah sesuai rencana aksi
		Penguatan dan sosialisasi dengan Stakeholder ataupun pihak ketiga	Telah sesuai rencana aksi
f.	Penilaian Maturitas SPIP	Melaksanakan penilaian mandiri pada kanwil	Telah sesuai Rencana
3.	<i>Evaluasi</i>		
a.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan dan reviu pengendalian internal pada Kantor Wilayah secara berkala	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	Telah sesuai rencana aksi

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Penyelenggaraan SPIP Triwulan III tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan sesuai rencana aksi, namun ada beberapa hal yang belum dapat terlaksana yaitu :

- a. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang menerapkan MR dengan baik
Penyebab belum terlaksananya karena kantor wilayah belum melakukan penilaian secara menyeluruh kepada pegawai;
- b. Kegiatan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY.

2. Saran

Untuk dapat menindaklanjuti hasil Monev dengan cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penilaian kepada Pegawai atas penyelenggaraan SPIP;
- b. Melaksanakan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh Pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DIY.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP ini dibuat, dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 September 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Agung Rektono Seto